

BAB I

PENDAHULUAN

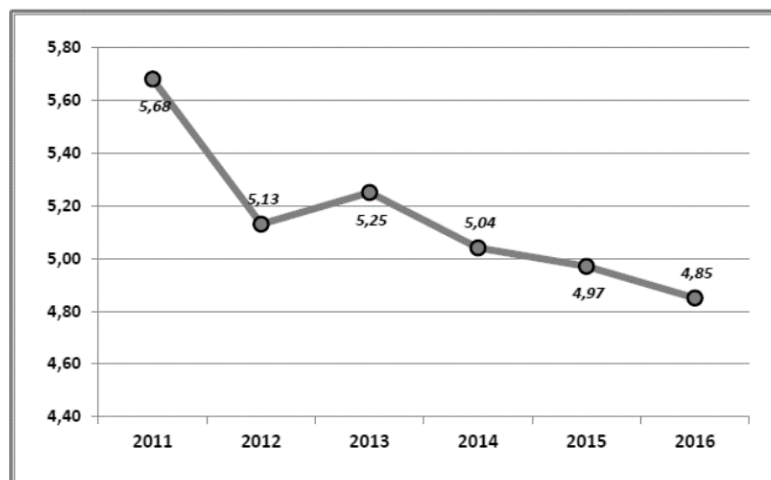
1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Berkembang masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat banyak diantaranya adalah kemiskinan, menurut lembaga pemerintah yang menangani permasalahan sensus penduduk, kemiskinan di Indonesia menurut data yang di dapat dari Badan Pusat Statistik adalah pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki strategi yang lebih baik lagi untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Data di atas di dapat melalui sensus penduduk, Dalam menentukan penduduk kategori miskin, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai Penduduk Miskin.

Data kemiskinan yang di sebutkan pada paragraf di atas adalah hasil dari cakupan seluruh data kemiskinan di setiap daerah yang berada di Indonesia, pada kali ini penulis akan membahas salah satu daerah yang terdapat di provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang, walaupun menjadi Ibukota Provinsi, Kota Semarang masih di rundung oleh permasalahan kemiskinan, Di tahun 2016, tingkat kemiskinan Kota Semarang menurun menjadi 4,85% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 4,97%. Perkembangan tingkat persentase kemiskinan di Kota Semarang selama enam tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Persentase Kemiskinan di Kota Semarang Tahun 2011 – 2016

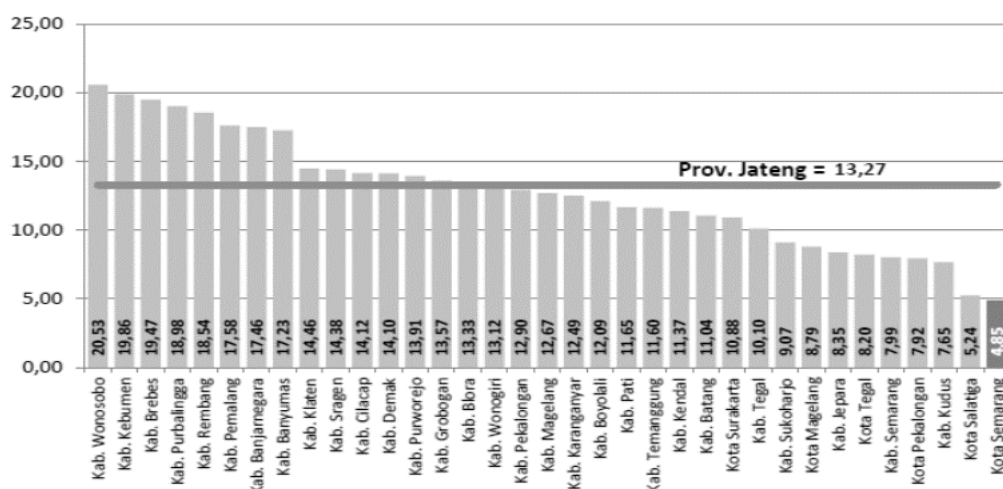


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

Penduduk miskin di Kota Semarang dalam enam tahun terakhir menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Ini dapat dilihat dari tingkat kemiskinan Kota Semarang pada tahun 2011 sebesar 5,68% yang merupakan tingkat kemiskinan tertinggi selama enam tahun terakhir, mengalami penurunan tajam pada tahun 2012 menjadi 5,13%. Sedangkan pada tahun 2013 kembali meningkat

sebesar 5,25%, dan baru pada tahun 2014 selalu mengalami penurunan hingga tahun 2016 sebesar 4,85%. Tingkat kemiskinan Kota Semarang pada tahun 2016 sebesar 4,85% jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan Jawa Tengah sebesar 13,27% menunjukkan kondisi yang lebih baik yaitu berada di bawahnya. Selain itu, tingkat kemiskinan di Kota Semarang merupakan yang terendah di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah, walaupun dilihat dari jumlah penduduk Kota Semarang lebih besar. Untuk lebih jelasnya posisi relatif tingkat kemiskinan Kota Semarang dapat dilihat gambar 1.2.

Gambar 1.2
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang
dengan Kota-Kota Lain dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh

kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Pengukuran kemiskinan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan kemiskinan makro dan kemiskinan mikro.

Data kemiskinan makro hanya menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan estimasi dan tidak menunjukkan siapa dan dimana posisi penduduk miskin tersebut. Secara makro jumlah penduduk miskin tahun 2016 ada sebanyak 83.590 jiwa atau sebanyak 4.85 persen dari seluruh penduduk.

Badan Pusat Statistik dalam mengukur kemiskinan makro, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Selain garis kemiskinan BPS juga mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*).

Indeks Kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk

miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Adapun garis kemiskinan tahun 2016 adalah sebesar Rp.382.160 /kapita/bulan. Dengan indeks kedalaman kemiskinan adalah 0,76 persen dan indeks keparahan kemiskinan adalah 0.18 persen.

Tabel 1.1
Kemiskinan Kota Semarang tahun 2016

	Jml Penduduk Miskin (Dlm 000)	Jml Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
Kota Semarang	83.59	4.85	0.76	0.18	382,160

Sumber : BPS Kota Semarang, 2016

Data kemiskinan mikro Kota Semarang diperoleh dari hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015, data ini dapat menunjukkan nama dan alamat dari rumahtangga miskin sehingga dapat digunakan untuk penyaluran berbagai program penyaluran bantuan.

Tabel 1.2
Hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Kota Semarang Tahun 2015

No.	Kecamatan	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera				Jumlah
			I	II	III	III+	
1	Banyumanik	1,645	3,910	5,963	19,649	5,164	36,331
2	Candisari	2,586	5,282	4,795	7,143	1,470	21,276
3	Gajah Mungkur	446	2,200	3,448	6,440	2,424	14,958
4	Gayamsari	2,418	3,542	3,244	7,276	1,979	18,459
5	Genuk	2,523	4,595	6,950	10,301	3,605	27,974
6	Gunungpati	2,190	2,830	4,519	13,886	1,010	24,435
7	Mijen	2,875	3,245	5,651	5,743	1,310	18,824
8	Ngaliyan	2,199	3,857	5,288	17,212	8,644	37,200
9	Pedurungan	2,440	5,941	8,371	26,638	5,060	48,450
10	Semarang Barat	3,587	8,694	8,711	14,626	4,685	40,303
11	Semarang Selatan	1,404	4,321	3,611	5,974	2,274	17,584
12	Semarang Tengah	1,191	4,223	4,568	3,620	1,819	15,421
13	Semarang Timur	1,823	3,976	6,133	5,482	982	18,396
14	Semarang Utara	5,323	7,490	6,473	9,575	1,846	30,707
15	Tembalang	4,055	5,227	5,393	26,695	4,377	45,747
16	Tugu	803	1,361	2,608	3,452	339	8,563
Kota Semarang		37,508	70,694	85,726	183,712	46,988	424,628

Sumber : BPS Kota Semarang, 2016

Jumlah rumah tangga miskin di Kota Semarang pada tahun 2015 hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) sebesar 13.819 rumah tangga. Untuk kategori Sangat Miskin ada sebanyak 8.662 rumah tangga, hampir miskin ada sebanyak 17.405 rumahtangga dan rawan miskin ada sebanyak 29.861 rumah tangga.

Tabel 1.3
Jumlah keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga di
Kota Semarang, 2016

KATEGORI	Rawan Miskin Lainnya	Hampir Miskin	Miskin	Sangat Miskin
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Jumlah Rumahtangga	29.861	17.405	13.819	8.662

Sumber : BPS Kota Semarang, 2017

Kelurahan Tanjung Mas yang berada di Kecamatan Semarang Utara memiliki jumlah penduduk sebanyak 29.073 Jiwa dengan jumlah kartu keluarga mencapai 7.557 dengan jumlah kemiskinan yang mencapai 2200 kartu keluarga.¹ Penulis mengambil kesimpulan bahwa angka kemiskinan yang berada di Kelurahan Tanjung Mas Semarang mencapai sepertiga dari jumlah Kartu keluarga yang terdaftar.

Penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah mengenai peranan CSR (corporate social responbility) terhadap pemeberdayaan masyarakat kurang mampu di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang utara. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu bagian dari *Corporate Responsibility* sehingga diminta atau tidak dan ada aturan atau tidak terkait dengan pelaksanaan CSR, pihak perusahaan akan tetap melakukan kegiatan CSR kepada masyarakat lokal.

Eksistensi perusahaan berpotensi besar mengubah lingkungan masyarakat, baik ke arah negatif maupun positif. Dengan demikian perusahaan perlu mencegah timbulnya dampak negatif, karena hal tersebut dapat memicu konflik

¹ Hasil wawancara dengan bapak ikhsan pegawai kelurahan Tanjung Mas pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 13.10 WIB.

dengan masyarakat, yang selanjutnya dapat mengganggu jalannya perusahaan dan aktifitas masyarakat.

Berbagai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang timbul akibat berdirinya suatu kawasan industri, mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab kepada publik khususnya masyarakat di sekitar wilayah perusahaan melalui aktivitas yang nyata sehingga dalam pelaksanaan kegiatan CSR, perusahaan harus berhati-hati dan dilakukan dengan cara-cara yang benar agar tidak memperkuat kondisi relasi ketergantungan dari masyarakat akan kehadiran perusahaan.

Kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) perusahaan dengan demikian membutuhkan pemahaman yang baik dan mendalam mengenai kondisi masyarakat setempat dimana kegiatan corporate social responsibility (CSR) perusahaan tersebut diwujudkan. Peran serta masyarakat dan stakeholder menjadi penting untuk dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan CSR tersebut. Kegiatan CSR bagi masyarakat merupakan suatu proses yang bergerak dan bertalian dengan sumber-sumber yang ada di masyarakat, yang saat ini mulai dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan. Di sisi lain, tanggung jawab sosial merupakan salah satu bagian dari corporate responsibility sehingga diminta atau tidak dan ada aturan atau tidak terkait dengan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR), pihak perusahaan akan tetap melakukan kegiatan CSR kepada masyarakat lokal. Namun, pada praktiknya, program CSR yang dilakukan oleh perusahaan masih banyak yang cenderung ditujukan untuk ‘meredam’ munculnya gejolak atau konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Pelaksanaan otonomi daerah juga memunculkan persoalan tersendiri yang harus

dihadapi oleh perusahaan multinasional di daerah. Seiring pula dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya untuk turut serta mengatur penyelenggaraan negara, masyarakat mulai ingin memperoleh manfaat dari keberadaan perusahaan yang beroperasi di daerahnya. Hal ini didukung oleh tuntutan penerapan konsep CSR baik secara lokal melalui berbagai aksi masyarakat, secara nasional melalui legitimasi hukum, serta iklim perindustrian di seluruh penjuru dunia.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Indonesia Power kepada masyarakat kurang mampu di wilayah kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana strategi pengelolaan CSR dengan program mengatasi kemiskinan yang dilakukan oleh PT Indonesia Power di Kelurahan Tanjung Mas Semarang pada tahun 2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada prinsipnya penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisis strategi pengelolaan CSR dengan program mengatasi kemiskinan yang dilakukan oleh PT Indonesia Power di Kelurahan Tanjung Mas Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini meliputi manfaat teoritik dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian teoritik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan Implementasi strategi pengelolaan CSR dengan program mengatasi kemiskinan guna terciptanya strategi implementasi yang baik.

Adapun manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pengetahuan kepada perusahaan lain mengenai Implementasi strategi pengelolaan CSR dengan program mengatasi kemiskinan yang dilakukan oleh PT Indonesia Power di Tanjung Mas Semarang.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya / kekuatan / kemampuan, dan atau proses pemberian daya / kekuatan / kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Selama ini pemerintah Indonesia telah terjebak dalam sebuah paradigma, bahwa pertumbuhan ekonomi identik dengan pendapatan Nasional yang besar sehingga mengabaikan ekonomi kerakyatan. Hal ini sesuai dengan fakta empiris bahwa ekonomi kerakyatanlah yang mampu bertahan dalam penyelamatan ekonomi Nasional. Oleh karena itu tidak ada alasan lagi untuk tidak mengakui eksistensi dan peranan ekonomi rakyat dalam percaturan ekonomi nasional. Ekonomi rakyat adalah ekonomi yang mandiri yang tidak memiliki ketergantungan dengan modal asing. Hal ini yang perlu untuk dilakukan perlawanan terhadap kekuatan ekonomi global adalah dengan meningkatkan daya saing ekonomi nasional, bukan melalui cara seperti yang di suarakan oleh pakar-pakar ekonomi konvensional neo klasik. Ada beberapa basis kekuatan sosial yang diperlukan dalam membangun produksi ekonomi rumah tangga yakni perlindungan terhadap ruang kehidupan, pemberian pengetahuan dan keterampilan, pendekatan informasi, pemanfaatan organisasi sosial dan jaringan sosial serta pemanfaatan sumber daya keuangan.²

Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut (Sumodiningrat, Gunawan, 2002); *pertama*, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. *Kedua*, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai

² Friedman, dalam Suparjan dan Hempri, 2007, pp.188-189).

beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. *Ketiga*, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.³

Menurut Sumodiningrat (Sumodiningrat, 2000 ndalam Ambar Teguh, 2004 : 78-79) beerpendapat bahwa pemberdayaan adalah pemberian kekuatan aagar masyarakat atau yang bersangkutan dapat berdaya, produktif dan bergerak secara mandiri. Pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah proses yang menciptakan agar masyarakat dapat berkembang dan bergerak secara mandiri memaksimalkan potensi yang ada. Logika ini didasarkan paada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplsit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangunkan daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang diiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Disamping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak

³ Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia.

masyarakat dalam perangkat ketergantungan (*charity*). Pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses keamndirian (Tri Winarni, 1998 : 76).

Konsep pemberdayaan menurut Friedman⁴ dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui sebuah pengamatan langsung. Menurut Chambers⁵ pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkup nilai-nilai social. Konsep ini mencerminkan paradigma bary pembangunan, yakni yang bersifat “*People Centered, Partycipatory, Empowering, dan Sustainable*”.

Pemberdayaan menunjuk kepada pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas kebodohan, bebas kesakitan; (b) menjangkau sumber – sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang – barang dan jasa yang mereka perlukan; dan (c) partisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan – keputusan yang mempengaruhi mereka.⁶

⁴ Friedman, John. 1992. *Empowerment The Politics Of Alternative Development*. Cambridge, USA:Blackwell Publisher.

⁵ Chambers, R. 1985. *Rural Development: Putting The Last First*. London: New York

⁶ Suharto, E. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama: Bandung.

Pengertian pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai berikut : *Pertama*, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang – orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995) dalam Suharto (2009 : 58); *Kedua*, pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian – kejadian serta lembaga – lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parson, 1994) dalam Suharto (2009 : 59); *Ketiga*, pemberdayaan menunjukkan pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur social (Suit dan Levin, 1987) dalam Suharto (2009 : 59); *Keempat*, pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya (Rappaport, 1984) dalam Suharto (2009 : 59).

Pengembangan masyarakat itu mencakup 6 (enam) dimensi yang terkait dengan kehidupan masyarakat. Keenam dimensi ini adalah pembangunan sosial (*social development*), pembangunan ekonomi (*economic development*), pembangunan politik (*political development*), pembangunan lingkungan (*environtmental development*), pembangunan budaya (*cultural development*), dan pembangunan personal / spiritual (*personal / spiritual development*). Dimensi –

dimensi saling terkait satu sama lain sehingga Ife menyebutnya dengan pembangunan terintegrasi (*integrated community development*).⁷

a. Pembangunan Sosial

Pengembangan social yang dimaksud disini berbeda dengan pengertian pembangunan social sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam kerangka pemikiran ini. Dimensi ini lebih merujuk pada pembangunan dalam sector social yang mencakup 4 (empat) kelompok, yaitu pelayanan social (pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya), *neighbourhood house*, *community centre*, perencanaan social dan animasi social.

b. Pembangunan Ekonomi

Pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui pembangunan ekonomi. Menurut Ife ada 2 (dua) kategori dalam pembangunan ekonomi, yaitu konservatif (*conservative community economic development*) dan yang radikal (*radical community economic development*). Pembangunan ekonomi yang konservatif dicapai dengan mendorong pengembangan industri seperti membangun pabrik sehingga tercipta lapangan kerja, menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan usaha baru atau mengembangkan industri yang berbasis sumber daya local, seperti kerajinan yang bercorak budaya lokal, dan sebagainya. Namun, terakdang dalam kenytaaan strategi ini hanya menguntungkan setkelompok sekelompok orang yang memiliki kemampuan terlibat dalam kegiatan industri. Karena itu, perlu ada alterantif strategi malalui pembagunan ekonomi yang radikal, dalam pengertian

⁷ Ife, Jim. 1995. *Community Development, Creating Community Alternatives – Vision, Analysis and Practice*. Melbrone : Logman Australia Pty Ltd.

mengembangkan aktifitas ekonomi yang dimiliki masyarakat setempat dan mengembangkan instistusi ekonomi ekonomi local yang melibatkan masyrakat setempat, seperti pengebangan koperasi, *community bank* dan kredit union.

c. Pembangunan Politik

Pengembangan politik ini bermuara pada pengemabngan kapasitaas masyarakat lokal untuk ikut abil bagian dalam proses politik, penguatan bargaining position dalam menghadapi pihak lain, baik pada tingkat loakal (internal) maupun nasional.

Ada dua wilayah yang menjadi perhatian dalam pembangunan politik ini, yaitu internal dan eksternal. Pembangunan politik internal, berkaitan dengan proses partisipasi dan pengambilan keputusan dalam komunitas masyarakat itu sendiri, terutama melalui peningkatan kesadaran dan pengorganisasian. Melalui proses seperti ini para anggota masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi secara efektif. Sedangkan pembangunan politik eksternal, diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak luar, termasuk pemerintah sampai tingkat nasional. Pembangunan ini terutama dilakukan melalui pengorganisasian dan aksi social, sementara proses penyadaran yang dilakukan pada pembangunan politik internal merupakan prakondisi sangat penting dalam pemberdayaan ini.

d. Pembangunan Lingkungan

Lingkungan (fisik) merupakan bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat, karena itu pembangunan lingkungan juga bagian yang penting

dalam pembangunan masyarakat. Pembangunan lingkungan dalam konteks pengembangan masyarakat diarahkan pada penyadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan dan memfasilitasi masyarakat untuk melindungi, memelihara dan merehabilitasi lingkungannya.

e. Pembangunan Budaya

Pembangunan budaya diarahkan untuk memperkuat sendi – sendi budaya lokal agar masyarakat tidak menerima dampak negative dari pengaruh perubahan budaya dari luar yang pada gilirannya merusak kehidupan masyarakat atau menimbulkan masalah social dalam masyarakat. Budaya lokal pada dasarnya sudah menjadi pegangan hidup dan merupakan kekayaan masyarakat setempat. Dalam konteks pembangunan masyarakat, pembangunan budaya mencakup 4 komponen, yaitu melindungi dan mengangkat kembali budaya lokal, melindungi dan mempertahankan budaya yang unik, multikulturalisme, budaya partisipatori (*participatory culture*).

f. Pembangunan Personal/Spiritual

Pentingnya pembangunan ini didasari bahwa pertimbangan masyarakat terdiri dari individu – individu. Pembangunan personal berkaitan dengan pengembangan diri seseorang. Berbagai aktivitas dalam pembangunan social, khususnya pelayanan social, seperti yang disebutkan diatas juga termasuk dalam pengembangan diri. Sementara pembangunan spiritual berkaitan dengan kehidupan iman atau keyakinan seseorang berpengaruh pada tata kehidupannya.

Jika dilihat dari operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : Pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Konsep pemberdayaan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.⁸ Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya digunakan dalam satu siklus saja dan berhenti pada

⁸ Sukmaniar. 2007. *Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*. Tesis. UNDIP. Semarang.

suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus tetap berkesinambungan dengan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya.⁹

Menurut Wilson¹⁰ terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat. Tahap pertama, yaitu keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Tahapan kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan – halangan atau factor – factor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada tahap ketiga, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. Tahap keempat, upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Pada tahap kelima ini, hasil hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap keenam, telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis diatas posisi yang sebelumnya. Pada tahap ketujuh, masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan keputusan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi.

⁹ Mubarak, Z. 2010. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Program PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Tesis. Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah dan Kota. UNDIP. Semarang.

¹⁰ Wilson, Terry. 1996. *The Powerment Manual*. London: Grower Publishing Company.

Apabila kita cermati dari serangkaian literature tentang konsep – konsep pemberdayaan masyarakat, maka konsep pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang diupayakan untuk melakukan perubahan. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memberi kekuatan/daya kepada kumpulan masyarakat yang berada pada kondisi ketidakberdayaan akan menjadi berdaya dan mandiri serta memiliki kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis.

1.5.2 CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Corporate Social Responsibility (“**CSR**”) dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Pada bab V Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UPT**”) pembinaan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dimana Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut.

Sejak dimulainya era reformasi belakangan ini, kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang membuat masyarakat semakin kritis ini untuk suatu perusahaan swasta agar melakukan sebuah tanggung jawab sosial perusahaan atas beroperasinya proses produksi perusahaan tersebut, pihak perusahaan dituntut untuk melakukan proses produksi berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Tanggung jawab sosial perusahaan adalah perusahaan berkewajiban untuk mentaati aturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah mengenai kontribusinya terhadap lingkungan dan masyarakat

melalui beberapa program yang dibiayai sendiri oleh perusahaan tersebut hal tersebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan.

Sejak DPR mengesahkan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau lebih dikenal dengan sebutan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai kewajiban perseroan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memiliki beberapa aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia.¹¹

Pendapat tanggung jawab sosial lainnya dikemukakan yang ditemukan oleh penulis, sebagai berikut:

*“A company’s commitment to operating in an economically, socially, and environmentally sustainable manner while balancing the interests of the diverse stakeholders”*¹²(www.csr-asia.com, social enterprise)

Definisi-definisi tersebut menunjukkan adanya keragaman dalam mengartikan dan mengimplementasikan CSR, sehingga, hingga saat ini tidak ada terdapat kesepakatan mengenai batasan tanggung jawab sosial perusahaan.¹³

Namun demikian terdapat suatu pemahaman yang sama di masyarakat Eropa mengenai CSR, sebagaimana pernyataan berikut:

“There is broad agreement in Europe on the definition of CSR as a concept whereby companies integrate social and environmental concerns – on a

¹¹ Undang – Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas

¹² www.csr-asia.com, diakses pada 25 November 2019, pukul 19.00 WIB

¹³ McWilliams, et.al, dalam Radyati, M.R. & Nindita. 2008

*voluntary basis- into their business operations as well as their interactions with stakeholders”.*¹⁴

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat ditarik inti bahwa CSR merupakan konsep sebagai berikut :

1. Perusahaan harus mempunyai perhatian terhadap persoalan sosial dan lingkungannya
2. Berdasarkan prinsip sukarela
3. Kegiatan bisnis dan interaksi dengan pemangku kepentingan harus memperhatikan persoalan sosial dan lingkungan

Setidaknya ada 2 (dua) landasan berkenaan dengan *corporate social responsibility* (CSR) yaitu berasal dari etika bisnis (bisa berdasarkan agama, budaya atau etika kebaikan lainnya) dan dimensi sosial dari aktivitas bisnis. CSR atau sering diartikan sebagai “*being socially responsible*” jelas merupakan suatu cara-cara yang berbeda untuk orang yang berbeda dalam negara yang berbeda pula. Artinya penerapan CSR di masing-masing negara harus disesuaikan dengan konteks sosial dan lingkungannya. Sehingga perlu kehati-hatian dalam menerapkan konsep CSR dari negara-negara maju di negara-negara yang sedang berkembang.¹⁵

Blowfield dan Frynas (2005) mengibaratkan CSR sebagai sebuah ‘payung’ bagi beragam teori dan praktek yang mengakui dan memahami persoalan-persoalan berikut:

¹⁴ *European Communities 2007*. diakses pada 26 November 2019, pukul 20.30 WIB

¹⁵ Frynas, Jędrzej George. 2009. *Beyond Corporate Social Responsibility: Oil Multinationals And Social, Challenges* New York: Cambridge University Press

1. Bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan alam, yang terkadang lebih jauh lagi.

Kelompok pertama, kelompok instrumental theories, menganggap bahwa CSR atau kegiatan sosial adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan ekonomi yang pada akhirnya adalah menghasilkan kekayaan. Pendekatan instrumental theories ini didukung oleh pandangan yang diungkapkan oleh Friedman (1970) bahwa satu-satunya tanggung jawab bisnis kepada masyarakat adalah memaksimalkan profit untuk para pemegang saham, sesuai dengan kerangka hukum dan kebiasaan etika dari negara tempat bisnis tersebut berada. Kelompok teori ini kemudian banyak diakui dan diterima oleh perusahaan, bahkan banyak perusahaan yang melakukan program CSR dengan menggunakan dasar teori ini. *“a leit-motiv of wealthcreation progressively dominates the managerial conception of responsibility”*.¹⁶

Perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya haruslah memerhatikan kondisi sosial budaya yang ada disekitarnya, hal ini menjadi penting karena jika ada pergerakan sosial yang ada di daerah sekitar perusahaan tentunya akan menghambat kegiatan operasional dan produksi perusahaan yang tentunya juga akan banyak merugikan perusahaan. Kecemburuan sosial adalah salah satu faktor utama timbulnya pergerakan dalam masyarakat hal ini dipicu karena terjadi perbedaan pendapatan yang sangat jauh antara pegawai perusahaan dengan masyarakat sekitar atau bahkan kondisi konflik yang timbul akibat dari adanya perbedaan pendapatan antara pegawai pendatang dengan

¹⁶ Windsor, 2001: hal. 226

pegawai lokal. Realita yang timbul tersebut tentu menjadi salah satu hambatan utama pembentukan kebudayaan perusahaan sehingga memperlambat perkembangan dan kemajuan perusahaan.

Perusahaan dalam meluncurkan program Corporate Social Responsibilitynya secara kongkrit dapat melakukan program berupa bantuan fisik, pelayanan kesehatan, dan pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan yang sesuai prinsip dari pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Dalam melaksanakan kegiatan perusahaannya masih banyak perusahaan yang hanya ingin mencari laba dan masih tidak melakukan program pembangunan masyarakat berdasarkan pemberdayaan. Perusahaan dewasa ini masih sangat banyak ditemukan adanya program CSR yang tidak berdasarkan pembangunan berkelanjutan.

Perusahaan dalam menjalankan program corporate social responsibility tentunya melibatkan kemitraan dengan banyak stakeholder diantaranya menjalin kerjasama dengan Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Universitas. Kerjasama ini merupakan sebuah tanggung jawab social antara para pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama : yaitu perlindungan lingkungan, jaminan kerja, pengembangan ekonomi masyarakat, pendidikan, sosial dan bantuan bencana kemanusiaan.

Tabel 1.4

Corporate Social Responsibilities Theories and Related Approaches

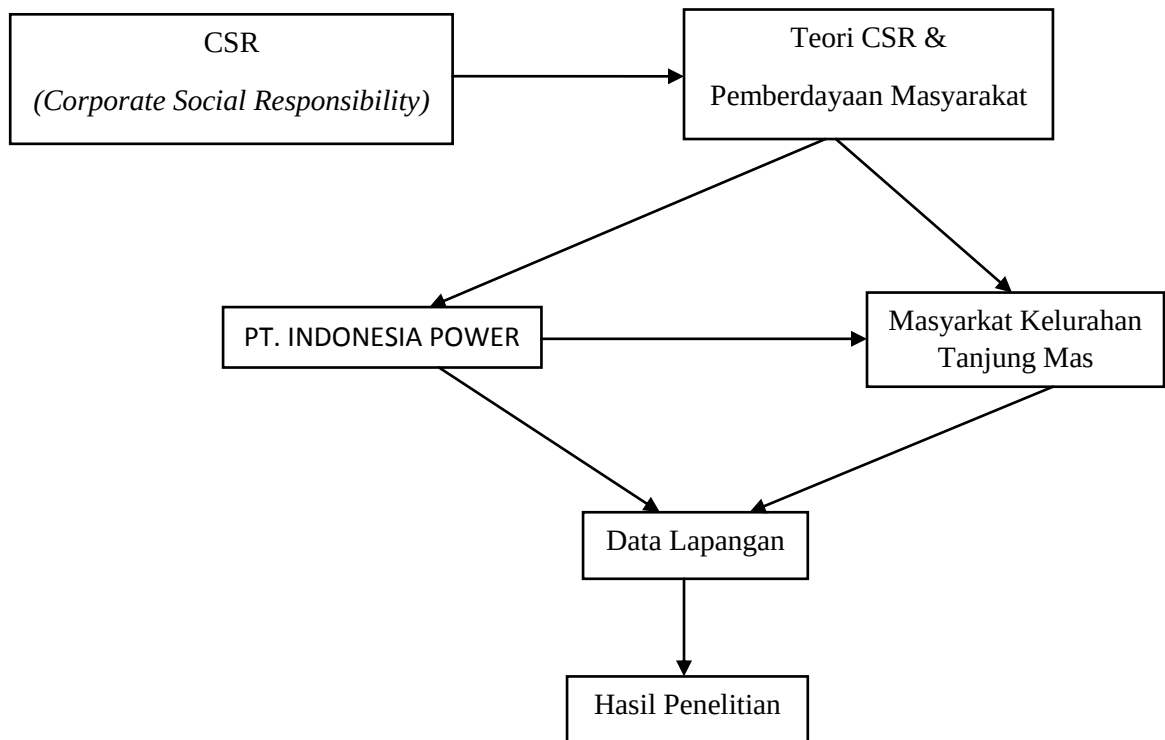
Jenis Teori	Pendekatan	Penjelasan Singkat	Beberapa Referensi Kunci
1. Instrumental theories (fokus pada pencapaian sasaran ekonomi melalui aktifitas sosial)	1. Maksimalisasi nilai <i>shareholder</i>	Maksimalisasi nilai jangka panjang	Friedman (1970), Jensen (2000)
	2. Strategi untuk keuntungan kompetitif	- Investasi sosial dalam konteks kompetitif - Strategi berdasarkan pandangan sumber alami dari perusahaan dan dinamika kapabilitas perusahaan - Strategi dari dasar piramida ekonomi	Porter and Kramer (2002) Hart (1995), Litz (1996) Prahalad and Hammond (2002), Hart and Christensen (2002), Prahalad (2003)
	3. <i>Caused-related marketing</i>	Pengakuan aktifitas sosial altruistik dimanfaatkan sebagai alat pemasaran	Varadarajan and Menon (1986), Murray and Montanari (1986)
2. Political theories (fokus pada pemanfaatan tanggung jawab kekuatan bisnis dalam arena politik)	1. Konstitusionalisme perusahaan (<i>Corporate constitutiona-lism</i>)	Tanggung jawab sosial bisnis muncul dari sejumlah kekuatan sosial yang mereka	Davis (1960, 1967)
	2. Teori Kontrak Sosial Integrative (<i>integrative social contract theories</i>)	Asumsinya bahwa terdapat suatu kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat	Donaldson & Dunfee (1994, 1999)
	3. <i>Corporate (or business) citizenship</i>	Perusahaan dipahami sebagaimana seorang warga dengan keterlibatan tertentu dalam komunitas	Wood & Lodgson (2002), Andriof & McIntosh (2001) Matten & Crane (in press)
3. Integrative theories (fokus integrasi tuntutan sosial)	1. Manajemen isu (<i>issues management</i>)	Proses-proses perusahaan merespon isu sosial dan politik yang mempengaruhinya.	Sethi (1975), Ackerman (1973), Jones (1980), Vogel (1986), Wartick and Mahon (1994)
	2. Tanggung jawab publik (<i>public responsibility</i>)	Hukum dan adanya proses kebijakan publik diambil sebagai rujukan untuk kinerja sosial (<i>social performance</i>)	Preston and Post (1975, 1981)

	3. Manajemen Pemangku Kepentingan (<i>stakeholder management</i>)	Keseimbangan para pemangku kepentingan	Mitchell et.al. (1997), Agle and Mitchell (1999), Rowley (1997),
	4. Kinerja Sosial Perusahaan (<i>Corporate social performance</i>)	Mencari legitimasi sosial dan proses-proses untuk memberi respon yang tepat terhadap isu-isu sosial	Carrol (1979), Wartick and Cochran (1985), Wood (1991b), Swanson (1995)
4. Ethical theories (fokus pada sesuatu yang baik untuk mencapai suatu masyarakat yang baik)	1. Teori Normatif Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder normative theories</i>)	Pertimbangan tugas-tugas yang terdapat dari perusahaan. Aplikasinya membutuhkan rujukan sejumlah teori moral	Freeman (1984, 1994), Evan and Freeman (1988), Donaldson and Preston (1995), Freeman and Phillips (2002), Phillips et al. (2003)
	2. Hak-hak Azasi Universal	Kerangkanya berdasarkan hak-hak azasi manusia, hak buruh dan penghargaan lingkungan	The Global Sullivan Principles (1999), UN Global Compact (1999)
	3. Pembangunan Berkelanjutan	Upaya mencapai pembangunan manusia berdasarkan pertimbangan saat ini dan generasi masa depan	World Commission on Environment and Development (Brundtland Report) (1987), Gladwin and Kennelly (1995)
	4. <i>The Common good</i>	Berorientasi pada kebiasaan baik masyarakat	Alford and Naughton (2002), Mele (2002) Kaku (1997)

Sumber: Garriga & Mele, 2004: 63-64

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Kerangka Berfikir



1.6.2 Kerangka Konseptual

Program *Corporate Social Responsibility* dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan kemiskinan masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas. Program ini ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki perekonomian melalui pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Kelurahan Tanjung Mas dengan PT. Indonesia Power, sebagai tanggung jawab perusahaan secara etika dan pemerintah kelurahan sebagai pihak yang memberikan dukungan pelaksanaan program tersebut. Pelaksanaan program ini dilihat dalam konsep pemberdayaan masyarakat dan peran kelurahan untuk memberikan meminimalisir kesenjangan dalam permasalahan kesejahteraan sosial.

1.7 Metode penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses penelitian ilmiah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian¹⁷, selain itu pendekatan kualitatif juga berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.¹⁸ Yang dimaksud yaitu untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi dari peneliti.

Menggunakan teori penelitian kualitatif dengan didukung teori *corporate social responbility* dan pemberdayaan masyarakat. Dengan tujuan untuk mengetahui strategi dari PT. Indonesia Power dalam menjalankan program pemberdaayaan masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan.

1.7.2 Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, khususnya PT. Indonesia Power dan masyarakat kurang mampu di wilayah kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang.

¹⁷ Lexy j. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008, hlm 6.

¹⁸ Iskandar, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Jakarta, 2009, hlm 11.

1.7.3 Subjek Penelitian

Dalam penentuan subjek penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling*. Dalam penentuan sampel ini tidak dimaksudkan untuk mewakili populasi, melainkan untuk mewakili informasi. Jika dalam penelitian kuantitatif sampel harus mewakili populasi, misalnya ada persentase atau rumus yang jelas tentang pengambilan sampel, tetapi dalam kualitatif tidak berdasarkan pada pertimbangan itu. Artinya ketika peneliti kualitatif hendak meneliti suatu masyarakat pada suatu wilayah, maka informan yang dapat diambil boleh terbatas yang terpenting adalah informasinya dianggap sudah mewakili informasi secara keseluruhan.

Subjek penelitian ini meliputi:

1. Perwakilan / Staff PT. Indonesia Power di Kota Semarang;
2. Masyarakat di wilayah kelurahan Tanjung Mas (RW 12, RW 13, RW 14,); dan
3. Tokoh masyarakat di Kota Semarang.

1.7.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Mengutip dari Lofland, Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnyaa adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁹ Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai salah satu bagian dalam penelitian dan memiliki unsur yang penting, dari teknik pengumpulan data yang akan digunakan.

Data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dengan melakukan wawancara kepada informan yang terkait dengan tema penelitian dan data sekunder dalam penelitian ini penulis akan melakukan studi kepustakaan,

¹⁹ Lexy j. Moleong, *Op. Cit*, hlm 157

mengumpulkan data yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, literature, karya ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Data primer, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak maupun lebih, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰ Penulis akan menggunakan petunjuk umum wawancara, yaitu, jenis wawancara yang mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar agar menjaga apa yang sudah direncanakan seluruhnya dapat tercakup, dan proses pelaksanaan wawancara serta pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya.²¹
2. Data sekunder merupakan suatu sumber data yang mengandalkan pada catatan, dokumentasi, maupun artikel yang ada, selain itu mengutip dari sugiyono, Data sekunder ini bersumber dari literatur yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya.²²

1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kumpulan dari data atau informasi yang didapatkan dari wawancara, artikel maupun gambar, mengutip dari Patton, Moleong menjelaskan analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian besar.²³ Maka dari itu dapat diketahui tema yang akan dirumuskan sebagai hipotesis kerja

²⁰ *Ibid*, hlm 186

²¹ *Ibid*, hlm 187

²² Sugiyono, *Op. Cit*, hlm 402

²³ , Lexy j. Moleong, *Op. Cit* hlm 280

yang disarankan dengan adanya data yang diperoleh. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.²⁴

Langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Miles dan Huberman, sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola pola pengarah dan sebab akibat.²⁵

1.7.6 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis ketika penelitian di lapangan. Reduksi berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus. Teknik analisis ini merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan

²⁴ *Ibid*, hlm 281

²⁵ Miles dan Michael Huberman, “*Analisis Data Kualitatif Buku Bersumber Tentang Metode-metode Baru*”, Jakarta : UIP, 1992, hlm 15-19

membuang yang tidak perlu serta mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

1.7.7 Penyajian atau *Display* Data

Penyajian atau *display* data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuan penyajian data yaitu untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan yang ada. Bentuk penyajian data kualitatif yaitu dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk tersebut menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah dipahami sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau harus melakukan analisis kembali.

1.7.8 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama berada di lapangan. Mulai dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat pola-pola, penjelasan-penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka tetapi kesimpulan sudah disediakan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, dan upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.